

REFORMASI BIROKRASI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Nian Riawati

Abstrak

In the life of the nation in the world, the bureaucracy is a key vehicle in the administration of the country in various fields of national life and in relationships between nations. Bureaucracy in charge of translating political decisions into public policy, and serves to manage the implementation of these policies are operational. Thus the bureaucracy is a key factor in realizing the success of a welfare state. Along with the changes that occur as a result of globalisasi, the bureaucracy in demand to change according to circumstances.

Globalization brings a strong influence on political and economic conditions around the world. This condition makes each country should prepare itself to produce effects that do not have negative consequences. Reform is one example of the impact of globalization. Reform is happening in developing countries are more prevalent due to foreign intervention. This is because the assumptions used considers the failure of bureaucracy to create the economic conditions caused internal factors. Therefore, foreign aid requires a structural adjustment that led to the creation of good Government.

The involvement of foreign institutions in the short term could help, but in the long run must be re-evaluated. This is done because the debt relief granted by the appendage-embroider the other prerequisites of the structural adjustment program that is political. Assistance from foreign donors is difficult to avoid because of the economic crisis but the process must be selective and soft, and as soon as possible in terms of paying off.

Key words: Reform, bureaucracy, globalization

Pendahuluan

Birokrasi adalah media yang dapat berperan dalam pengembangan demokrasi, ia mampu menjembatani kebijakan administratif dari penguasa dengan aspirasi rakyat. Dalam praktek birokrasi dapat menimbulkan

keadaan yang demokratis maupun anti demokrasi, tergantung kepada sifat keterbukaan atau ketertutupan birokrasi itu sendiri. Semakin terbuka birokrasi maka kadar demokrasi semakin meningkat, demikian sebaliknya.

Sumber dari adanya birokrasi salah satunya adalah adanya prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat kontradiksi yang mutlak antara birokrasi dengan demokrasi. Birokrasi dianggap mempunyai peran penting dalam dunia modern. Ia dapat berperan sebagai alat untuk memperluas praktek demokrasi.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk terselenggaranya sistem birokrasi yang efektif, bersih, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan serta berpihak kepada rakyat. Reformasi birokrasi di perlukan karena penghematan anggaran negara, optimalisasi alokasi sumber daya, optimalisasi kinerja, peningkatan mutu pelayanan, pencegahan korupsi dan perbaikan sistem. Namun demikian pemerintah belum sepenuhnya sadar mengenai berbagai permasalahan dalam reformasi birokrasi, yaitu permasalahan birokrasi yang belum dianggap permasalahan yang sangat serius, tidak adanya cetak biru reformasi birokrasi yang komprehensif, tidak adanya payung hukum yang kuat yang mendukung percepatan reformasi birokrasi, dan tidak adanya peran kepemimpinan yang secara kuat mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah harus berani menghadapi berbagai tantangan yang terdapat di dalam birokrasi, seperti tradisi birokrasi yang sudah berurat akar, resistensi "penguasa" birokrasi yang sudah terlanjur nyaman dan mapan, aturan hukum yang terlanjur mempertahankan status quo, dan reformasi birokrasi yang belum menjadi kebutuhan riil.

Sedangkan globalisasi membawa pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi ini membuat setiap negara harus mempersiapkan diri terhadap efek yang ditimbulkannya sehingga tidak berakibat negatif. Reformasi adalah salah satu contoh dampak dari globalisasi. Reformasi yang terjadi di negara-negara berkambang lebih banyak terjadi karena intervensi asing. Hal ini karena asumsi yang digunakan yang menganggap kegagalan birokrasi untuk menciptakan kondisi ekonomi disebabkan faktor-faktor internal. Oleh karena itu lembaga bantuan asing

mensyaratkan adanya penyesuaian struktural yang mengarah pada penciptaan *good governance*.

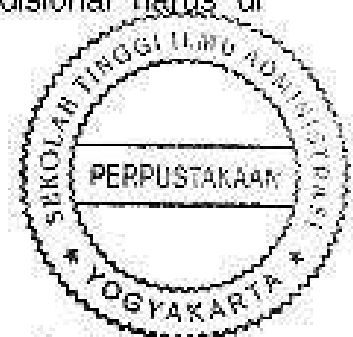
Setiap negara harus memiliki agenda dalam melakukan reformasi. Informasi tentang kondisi suatu negara yang paling mengetahui adalah negara itu sendiri. Oleh karena itu, analisis kebutuhan untuk melakukan reformasi dapat dilakukan sehingga strategi reformasi yang dipilih tepat serta tidak merugikan masyarakat/warga negara. Reformasi merupakan upaya untuk menciptakan cara yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga pemerintah (birokrasi) dirancang untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat tapi seiring dengan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelayanan mengalami perubahan. Akibatnya, definisi tentang tata pemerintahan yang baik dan administrasi yang layak juga mengalami perubahan.

Model yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan negara-negara (model tradisional) bukan berarti tidak memiliki hasil positif dalam bagi masyarakatnya. Secara ilmiah, model tradisional selama beberapa dekade berhasil untuk mengorganisasikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya optimisme tentang kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah. Namun globalisasi telah mengubah pandangan yang berkembang dalam masyarakat tentang pelayanan publik sehingga prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh model tradisional tidak lagi kondusif bagi bentuk organisasi yang memberikan pelayanan publik. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik maka prinsip-prinsip yang terdapat dalam model tradisional harus di reformasi.

Pembahasan

Kritik terhadap *Good Governance*

Tak dipungkiri kehadiran *good governance* cukup revolusioner dalam kancah ilmu sosial. *Good governance* juga telah melakukan revisi total atas



tem administrasi publik atau pemerintahan yang selama ini telah terlanjur institusionalistik. *Governance* sudah bukan lagi secara eksklusif menjadi menu yang disuguhkan pada negara dan su-sub organisasinya (public sectors). *Governance* adalah sebuah proses berinteraksinya berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor kunci, yaitu negara, masyarakat dan bisnis) utamanya dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik atau *public patrimony*.

Good governance kemudian bagai kanker ganas menyebar ke segala arah. Tidak hanya berkuat pada ilmu administrasi publik, tetapi merambah pada berbagai kajian lain seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi terapan. Produk yang paling fenomenal dari *good governance* adalah ketika dirinya berhasil menemukan missing link antara kerja reformasi pemerintah dengan penanggulangan kemiskinan. Argumentasinya adalah dengan *good governance* maka distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin makin terbuka lebar (Renzio, 1997)

Kenyataannya memang tidaklah jauh dari harapan. Inovasi-inovasi seperti pilkada langsung, musrenbang, penjaringan aspirasi rakyat, adalah merupakan hasil (*output*) dari penerapan *good governance*. Dampak (*outcome*) yang diharapkan adalah makin eratnya interaksi antara rakyat dengan negara, utamanya dalam hal distribusi anggaran.

Hanya saja prestasi gemilang dari *good governance* tersebut menuai kritik tajam yang berangkat dari identitasnya itu sendiri. Kata "good" menjadi sesuatu yang hegemonik dan seragam. Proses penyeragaman atas sesuatu yang disebut "good" itu juga dilakukan tak jarang dengan paksaan. Ali farazmand (2004) secara tegas menyebutnya sebagai bagian dari praktek penyesuaian struktural (*structural adjustment programs/SAPs*). Sebab kenyataannya di berbagai belahan dunia *good governance* adalah program yang di introdusir oleh lembaga-lembaga donor internasional, seperti WB, IMF, ADB, UNDP, EU dan semacamnya. indikator akan sesuatu yang disebut "good" itu juga di bawah jauh dari amerika serikat atau eropa untuk kemudian dipakai dalam mengukur berbagai praktek di negara-negara berkembang. Tidak ada ruang bagi lokalitas untuk mendefinisikan

"good" menurut keyakinan mereka. Term "good" dalam *good governance* adalah *westernized* dan diabsolutkan sedemikian rupa sehingga kadang mendekati "god".

Kritik selanjutnya terhadap *good governance* adalah kegagalannya dalam memasukkan arus globalisasi dalam *rigura* analisisnya. Dalam *good governance* seolah-olah kehidupan hanya berkutat pada interaksi antara pemerintah di negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dan rakyat di negara tertentu pula. Tentulah ini sangat naif. Sebab kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan berkuasa di atas ketiga elemen tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan. Aktor tersebut adalah dunia internasional. WTO, perusahaan multi nasional, UN, dan lembaga-lembaga donor secara nyata telah hadir dalam setiap relung kehidupan bernegara dan bermasyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kita telah sarna-sama menyaksikan bagaimana aktor-aktor ini sampai ke pelosok desa. Program-program world bank misalnya telah merasuki alam pikir dan nilai-nilai masyarakat hingga di tingkatan desa, bahkan komunitas yang lebih kecil.

Merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global. Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variabel, yang sebenarnya sangat penting, tidak masuk ke dalam hitungan. Variabel-variabel yang absen itu adalah kearifan lokal sebagai akibat hegemoni term "good" ala barat dan dampak dari kekuatan kooptasi internasional.

***Good governance* dalam bingkai neokolonialisme**

Sepuluh tahun lalu di depan konferensi PBB, presiden tanzania Julius, K. Nyerere, dengan lantang telah mengkritik habis-habisan *good governance* yang dikatakannya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Sebab *good governance* akan mengerdilkan struktur negara-negara berkembang, sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar. Terlepas dari benar salahnya kritik sang presiden, tapi gugatannya terhadap pengaruh struktur

global terhadap reformasi pemerintahan inilah yang mengilhami Farazmand untuk tidak hanya terfokus pada tiga aktor (pemerintah, pasar dan *civil society*) tetapi juga kekuatan internasional.

Hal ini di dukung oleh fakta kesenjangan global yang kian melebar. Data dari UNDP tentang perbandingan GDP perkapita konstan negara kaya, menengah dan miskin sejak tahun 1960 sampai tahun 2002 menunjukkan fakta yang sangat menarik. Gap antara negara miskin yang ditinggali sekitar 2,5 milyar jiwa dengan negara menengah (2,7 milyar jiwa) relatif stagnan, yaitu berkisar \$1.500. secara mengejutkan gap antara negara kaya (kurang dari 1 milyar jiwa) dengan negara menengah di era 1960 berkisar \$7000 dan terus naik secara fantastis hingga tahun 2002 menjadi \$25.000 lebih. Kita bisa melihat hasil pembangunan internasional mulai dari growth theory sampai terakhir good ekonomi dunia hanya menghasilkan kerapuhan fundamen ekonomi dunia dan kesenjangan global yang semakin akut.

Joseph stiglitz sebagai mantan kepala ekonomi Bank dunia, juga melontarkan kritik yang sangat pedas. Ia mengatakan bahwa kebijakan reformasi pasar bebas dari lembaga-lembaga keuangan global telah turut berkontribusi dalam merusak tatanan ekonomi negara berkembang. Caufield (1996) juga mengatakan bahwa kemunduran ekonomi negara-negara selatan saat ini disebabkan oleh asumsi-asumsi yang ada di lembaga-lembaga keuangan ini. Idiologi yang disebutnya sebagai "western recipes" telah menyingkirkan konsep-konsep ekonomi tradisional yang kemungkinan jauh lebih tepat untuk dipakai negara-negara tertentu. Asumsi yang paling parah menurut caufield adalah anggapan bahwa negara-negara berkembang tak akan pernah maju tanpa bantuan dari luar. Inilah praktek yang mengabdikan neo-kolonialisme hingga saat ini.

Dalam hal ini kritik dari Arif Dirlik (mongja,1996) sangatlah tajam yaitu:

Transnasionalisasi produksi adalah sumber dari terjadinya penyatuan global dan fragmentasi dari sejarah kapitalisme. Homogenisasi dunia baik secara ekonomi, sosial maupun budaya yang terjadi melalui hal itu adalah pembunaran dari prediksi marx.

Argumen tersebut didukung oleh kenyataan akan banyaknya intelektual-intelektual di negara berkembang yang ikut ikutan mendukung asumsi-asumsi global tersebut. Mereka sibuk menyalahkan faktor internal

negaranya sebagai sumber masalah keterpurukan ekonomi mereka. Dan mengagung-agungkan pentingnya intervensi dari luar (lembaga-lembaga donor internasional) sebagai satu-satunya solusi.

Sejak awal tahun 1990-an, organisasi-organisasi internasional besar, yang pertama dan terutama diantaranya adalah internasional monetary fund (IMF) dan bank dunia, memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada negara-negara anggotanya untuk menerapkan "good governance". Namun definisi-definisi dari istilah ini, dan sejalan dengan hal itu substansi dari istilah tersebut, sangat beragam dari institusi ke institusi lain. Hal ini kemudian menghalangi perumusan definisi legal yang tepat mengenai istilah tersebut terutama karena istilah *governance* bisa bersifat global dan corporate (Herrera, 2004)

Globalisasi dan Demokratisasi

Pengaruh globalisasi yang terbesar dalam tata pemerintahan adalah arus demokratisasi. Perbedaan term "demokrasi dan demokratisasi" adalah terletak pada aspek ideologisnya. Demokrasi adalah sebuah konsep ideal yang bersifat generik. Sedangkan demokratisasi lebih merupakan penyebaran secara luas sebuah bentuk keyakinan dan definisi tentang demokrasi. Sehingga demokratisasi yang dilakukan secara global saat ini lebih merupakan sebuah kerja politik dan ideologis. Prinsip-prinsip demokrasi juga telah di curi oleh *good governance*. Ia mengklaim berbagai pola yang dikenal sebagai bagian operasional dari demokrasi sebagai miliknya. Kendati itupun sesungguhnya hanya sebatas pada aras demokrasi liberal saja (Luebbert, 1991)

Seperti kita tahu, bahwa ada dua arus besar dalam wacana demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi liberal dicirikan dengan adanya kebebasan penuh pada individu. Sedangkan demokrasi sosialis/komunis di cirikan dengan dominasi kekuasaan atau pemerintah untuk mengatur urusan-urusan warganya. Negara menempatkan diri sebagai gerakan yang mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam *good governance* gagasan demokrasi sosialisme akan dianggap sebagai sebuah masalah.

Maka tidak heran jika spirit dari *good governance* adalah meminimalkan peran negara (*minimizing state*) dan mengedepankan pasar (*market oriented*). Ini sekaligus menunjukkan betapa teori ini tidaklah mampu menempatkan dirinya secara konseptual untuk berpihak kepada rakyat, terlebih di negara berkembang. Kita sama-sama tahu bahwa pasar hari ini dikuasai oleh negara-negara maju. Kapital dan teknologi pengendali ekonomi dunia tidaklah berlaku secara equal. Negara berkembang selalu saja menjadi objek dari trend ekonomi global yang di ciptakan oleh negara maju khususnya negara-negara G-8. Oleh karena itu keberpihakan kepada pasar berarti memberi ruang yang makin luas pada diaspora kepentingan-kepentingan negara kapitalis untuk terus saja menjajah dan mengeksploitasi ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia.

Empat level sasaran Reformasi

Level dari tata pemerintahan (*governance*) mencakup empat tingkatan, yaitu lokal, nasional, regional dan internasional. Keempatnya tidak hanya di dekati secara mendalam satu persatu, melainkan juga di lihat ketarkaitannya satu sama lain. Sebab selama ini reformasi tata pemerintahan hanya berkutat pada dua level saja, yaitu reformasi tata pemerintahan di tingkat lokal dan nasional. Tetapi ilmu administrasi publik seolah hanya mengabaikan level regional dan level internasional sebagai lokus kajiannya. Administrasi publik terkotak hanya mengurus urusan domestik sebuah negara tertentu, dan tidak boleh menyentuh sama sekali aspek tata pemerintahan di atasnya. Maka harus ada paradigma baru dalam administrasi publik yang mampu menerobos batas-batas mitologi ketabuan khazanah ilmu administrasi yang selama ini menganggap bahwa persoalan hubungan antar negara bukanlah wilayah kajian administrasi publik. Administrasi publik hanya dan harus mengurus soal-soal domestik satu negara tertentu saja. Itu semua adalah pandangan tradisional dari administrasi publik yang sudah harus mulai di tinggalkan.

Ketika berbicara pada tingkatan lokal maka yang menjadi fokus adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

dan kebijakan publik yang ada di daerah. Pada dasarnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan otonomi daerah harus di pahami sebagai wujud representativeness dari suatu produk kebijakan. Pendapat umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih akan dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis. Selain dari pada itu, memberikan keleluasaan otonomi kepada daerah, diakuinya pula, tidak akan menimbulkan "disintegrasi" dan tidak akan menurunkan derajat kewibawaan pemerintah nasional. Malah sebaliknya kondisi ini akan menimbulkan respek daerah terhadap pemerintah pusat (Smith, 1986). Karena itu, ada sebuah slogan yang sering di lancarkan : ".....as much autonomy as possible, as much central power as necessary" (Buckelman dalam Koswara,1999)

Reformasi tata pemerintahan di tingkat nasional berarti bagaimana formulasi gabungan antara partisipasi masyarakat dengan keselarasan internasional, norms and rules dapat terejawantahkan dalam kebijakan skala nasional. Di Indonesia kita telah memiliki proses perencanaan pembangunan yang cukup sistematis dari tingkat lokal hingga tingkat nasional (UU no 25/2004). Sayangnya pada tingkatan musyawarah pembangunan nasional tidak cukup di sertakan apa peran dan pengaruh pelaksanaan pembangunan di Indonesia dengan capaian internasional. Sehingga di lihat dari kaca mata global corak perencanaan pembangunan di Indonesia masih sangat ego-sektoral. Kita bisa membandingkan dengan perencanaan pembangunan di negara lain yang telah memiliki cukup peran yang signifikan dalam memberi kontribusi pada pembangunan dunia. Memang alasan klise yang selalu muncul adalah bahwa kita negara miskin sehingga tidak mungkin memiliki cukup dana untuk membantu negara lain. Tetapi harus disadari bahwa kontribusi kita saat ini bukan hanya bantuan finansial, melainkan bisa berupa partisipasi untuk perbaikan kondisi global, baik ekonomi, politik, sosial maupun lingkungan hidup. Hal ini juga penting dalam memperkuat posisi tawar bangsa ini di mata internasional yaitu

dengan menggunakan apa yang disebut soft power (Nye, 1990). Sehingga apa yang terwujud dalam perencanaan pembangunan tingkat nasional kita ternyata juga memiliki kepedulian terhadap kondisi global, bukan perencanaan ego-sentris.

Di tingkat regional adalah kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Kita telah memiliki ASEAN dan APEC khususnya untuk kerjasama ekonomi di tingkatan regional. Dan harus pula disadari bahwa ada misi-misi ideologis ekonomi politik di balik organisasi-organisasi itu. Tetapi, sebagaimana pandangan konstruktivisme, bahwa segala sesuatunya tidak ada yang baku. Yang dibutuhkan adalah kecerdikan kita dalam memanfaatkan peluang yang ada dari lembaga-lembaga kerjasama regional yang tersedia.

Sedangkan internasional adalah bagaimana agar negara-negara yang selama ini lemah dan dilemahkan dapat muncul. Di lain pihak, negara-negara yang selama ini mendominasi dapat "dilemahkan". Hubungan antar negara dalam percaturan global kurang lebih sama dengan konsep Machiavelli tentang hubungan oposisi biner antara negara dan rakyat.

Inovasi sebagai inti dari Reformasi

Dalam konsepsi pemerintahan mutakhir, inovasi dan kreatifitas adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan. Sebab, pemerintahan hari ini tidak lagi berhadapan dengan masalah dan realitas yang itu-itu saja. Apel pagi, rapat-rapat rutin, urusan surat menyurat dan implementasi prosedur sudah bukan merupakan tugas inti dari sebuah pemerintahan. Pada saatnya sistem mekanis akan mengerjakan hal-hal membosankan itu. Pemerintahan modern berhadapan dengan banyak situasi yang makin terkoneksi secara ekstrem. Globalisasi bahkan membuat matrik kehidupan menjadi lebih rumit dari sebelumnya (Farazman, 2004)

"Don't rock the boat" adalah pepatah yang terlanjur mendarah daging dalam tubuh birokrasi kita. Keadaan yang sudah ada telah membuat semua orang senang dan aman, maka janganlah sekali-kali mencoba untuk menggoyangkan perahu yang sudah tenag mengapung di tengah danau.

Tetapi ketenangan dan kenyamanan itu membuat perahu diam di tempat, tidak bergerak kemanapun. Kepentingan para birokrat untuk memperoleh rasa "aman" itulah merupakan tantangan terbesar dalam menumbuhkan inovasi dalam tubuh pemerintahan. Sistem dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dalam proses birokrasi pemerintahan telah menciptakan resistensi yang sangat kuat bagi datangnya inovasi. Konfigurasi politik juga turut andil dalam proses pengendalian inovasi. Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana dominasi tokoh-tokoh konservatif dalam kepemimpinan di tanah air. Kader-kader muda yang diharapkan dapat membawa inovasi tak bisa leluasa muncul ke dalam kancah politik tanpa menggantungkan karirnya pada tokoh-tokoh tua. Kebanyakan tokoh tua juga berperilaku mendikte pilihan dan langkah-langkah politik kaum muda. Kita bisa melihat betapa partai-partai politik besar hari ini sangat tergantung pada figur tokoh tua dan konservatif yang sangat hegemonik.

Sistem mapan birokrasi dan konfigurasi politik di Indonesia telah membuat banyak inisiatif inovasi mengalami proses penuaan dini dan layu sebelum berkembang. Secara psikis, perilaku politik para inovator ketika memasuki sistem menjadi tidak dinamis dan cenderung mengekor pada tuntutan para patron. Ini seakan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Pemimpin-pemimpin muda itu kemudian tercerabut dari akarnya. Keharusan untuk mengikuti "pakem" ketika memasuki sebuah sistem harus mulai dipersepsi sebagai mitos, atau setidaknya tantangan. Solusi yang bisa diambil adalah perubahan struktur pemerintahan yang berbasis pada fungsi (kompartementalistik) menuju berbasis pada klien. Dalam hal ini istilah TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) adalah hambatan terbesar dalam reformasi tata pemerintahan. Menemukan solusi brilian atas masalah pokok yang dihadapi masyarakat dan mencari jalan yang lebih baik atas hal yang sedang berjalan, adalah tugas pokok yang di emban semua birokrat.

Inovasi tidak mesti harus bersifat revolusioner dan fragmentatif. Dalam level tertentu bisa saja inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Yang terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru (besar atau kecil) di dalam praktek birokrasi keseharian.

Inovasi dapat dilakukan di dalam berbagai aspek. Di bidang teknologi dilakukan dalam hal menemukan teknik dan berbagai metode baru dalam melancarkan berbagai proses perencanaan maupun pengantaran pelayanan publik. Di bidang pembangunan/ pengelolaan sumber daya, inovasi diperlukan dalam hal menemukan cara yang tidak hanya efektif dan efisien melainkan juga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inovasi dalam sistem komunikasi adalah terkait dengan makin makin terbukanya ruang publik sehingga memudahkan sarana dan prasarana komunikasi yang egaliter antara aktor-aktor dalam tata pemerintahan. Inovasi juga harus marak dalam kegiatan-kegiatan operasional seperti di dalam pengelolaan organisasi dan manajemen, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Tidak hanya di bidang teknologi, di bidang ideologi inovasi juga sangat diperlukan. Utamanya dalam membongkar berbagai paradigma lama tentang birokrasi yang rutin dan monoton yang masih kuat terbenam menuju pada pemahaman birokrasi yang lebih dinamis.

Inovasi merupakan keniscayaan dari dunia global yang terus berubah secara cepat. Sebab dengan adanya perubahan globalisasi ini banyak asumsi-asumsi yang harus segera di koreksi sewaktu-waktu. Tidak mungkin, misalnya dalam menyusun APBD kita hanya bergerak pada asumsi yang monoton dan hanya merubah angka sedikit dari anggaran-anggaran terdahulu. Sikap seperti itu jauh dari cita-cita birokrasi yang dinamis. Maka tanpa inovasi dan adaptasi, pemerintahan akan cepat rusak (*soundless*). Akan tetapi, memang inovasi harus di dukung oleh kapasitas organisasi yang memadai dan kemampuan organisasi itu untuk mengimplementasikannya.

Inovasi juga harus di sertai dengan kemampuan birokrasi yang tangguh dalam antisipasi dan luwes dalam melakukan adaptasi. Hal ini dikarenakan watak inovatif juga mencakup kemahiran dalam melakukan prediksi. Dalam pengertian mahir dan ahli dalam memilih berbagai variabel yang berpengaruh terhadap kondisi saat ini dan masa depan. Kemampuan itu akan membawa pada sikap antisipatif terhadap segala perubahan. Sehingga birokrasi tidak mudah shock dalam menghadapi kondisi-kondisi yang penuh dengan kondisi serba mungkin yang ada di depan mata.

Disamping itu, bila memang ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang benar-benar di luar perhitungan, birokrasi juga harus mampu dengan luwes beradaptasi dengan lingkungan baru. Situasi politik dengan ekonomi dapat berubah setiap waktu. Maka birokrasi harus dapat segera beradaptasi tanpa harus terfragmentasi. Istilah "ganti menteri ganti kebijakan" bukanlah sikap luwes yang dimaksud di sini. Fleksibilitas artinya adalah dalam tataran teknis dan strategis, buka fleksibel dalam tujuan dan komitmen. Hal ini juga yang ditegaskan oleh golombiewski bahwa birokrasi harus di gerakkan oleh komitmen bukannya kepatuhan. Watak birokrasi yang hanya mengekor pimpinan politik baru adalah watak birokrasi yang pengecut dan hanya mengandalkan kepatuhan tetapi tidak memiliki komitmen. Komitmen pada tujuan dasar pemerintahan, yaitu melayani kepentingan rakyat. Bukannya melayani kepentingan atasan.

Penutup

Reformasi merupakan upaya untuk menciptakan birokrasi yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat. Namun globalisasi, mengubah definisi tentang tata pemerintahan dan administrasi yang baik. perubahan ini tidak mudah karena patologi yang terjadi dalam birokrasi telah berurat akar. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan birokrasi itu menekankan perlunya ketertutupan struktural untuk memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan inovasi. Berkenaan dengan orientasi birokrasi yang lebih melihat ke pasar, kelak di harapkan keputusan di dasarkan pada analisis logis dan melihat secara jeli implikasi dari kebijakan pro-pasar untuk legitimasi birokrasi publik, moralitas, dan motivasi pegawai negeri, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya bagi penduduk. Untuk itu, pembuat kebijakan mempertimbangkan perbedaan mendasar antara sektor publik dan sektor swasta dalam hal tujuan, struktur, norma-norma, meneliti secara kritis pelaksanaan ekonomi, sosial dan keuntungan serta kerugian administrasi dalam transisi birokrasi, mengidentifikasi siapa saja yang diuntungkan, dan siapa yang tidak diuntungkan dari perubahan birokrasi

Daftar Pustaka

- Farazman A, *Sound Governance in the age of the age of globalization*, in Ali Farazmand, ed. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations* (Westport, CT: Praeger,2004)
- Hirst, Paul dan Thomson, Grahame. 2001. *Globalisasi adalah mitos*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Hay, Colin dan Marsh, David. 2000. *Demystifying Globalization*. , New york: Palgrave publishers
- Koswara, E. 1999. *Upaya reformasi Undang-undang tentang otonomi daerah: telaah tentang prinsip-prinsip yang termuat dalam RUU tentang pemerintahan daerah*
- Luebert, G. M. 1991. *Liberalism, Fascism, or Social Democracy*. Oxford university Press Igen,2006 *Hard power,soft power and the future of Transatlantic relations*. Ashgate Publishing, Ltd
- Mansour, Fakhri.2002. *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Putra, Fadillah. 2009. *Senjaka Good Governance*. Malang: Averroes Press
- Wolf, Martin.2007. *Globalisasi jalan menuju kesejahteraan*. Jakarta: Freedom institute.